



Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Ketidakpastian Lingkungan Kerja, Pengawasan Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan, Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Survei terhadap kantor Walikota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat)

Juniawan Mandala Putra^{1*)}; Martinelly Sembiring²⁾; Lasro Habeahan³⁾

¹⁾ juniawanmp@gmail.com, Universitas Mercu Buana, Indonesia

²⁾ martinelly.sembiring@gmail.com, Universitas Terbuka, Indonesia

³⁾ habeahanlasro@gmail.com, Universitas Tarumanegara, Indonesia

I N F O A R T I K E L

Kata kunci:

Penerapan akuntansi sektor publik, ketidakpastian lingkungan kerja, Pengawasan sistem pengendalian internal, Kualitas laporan keuangan, Kejelasan sasaran anggaran

Dikirim: 29 April 2022

Diterima: 11

Agustus 2022

Dipublikasikan: 9 September 2022

Alamat email

penulis

korespondensi:

juniawanmp@gmail.com

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan akuntansi sektor publik, ketidakpastian lingkungan kerja, pengawasan sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, kejelasan sasaran anggaran terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintahan Walikota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, jumlah pegawai pemerintahan yang menjadi sampel penelitian ini adalah 3 kantor pemerintahan DKI Jakarta setiap kantor pemerintahan 50 responden pegawai pemerintahan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel acak, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan oleh penelitian adalah analisis regresi berganda. Data dilakukan melalui survey dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda didukung versi SPSS hasil 24.0 penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, ketidakpastian lingkungan kerja, pengawasan sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, kejelasan sasaran anggaran signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil adjusted R square ditemukan bahwa, penerapan akuntansi sektor publik, ketidakpastian lingkungan kerja, pengawasan sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, kejelasan sasaran anggaran terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan dapat dijelaskan dengan 25,0% sedangkan 75,0% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

1. PENDAHULUAN

Perekonomian yang dimiliki Indonesia merupakan ekonomi berbasis pasar, dimana pemerintahan yang memiliki peranan penting. Sistem ekonomi di Indonesia merupakan sistem yang berdasarkan dari aturan-aturan, aspek dan mekanisme yang memiliki ketergantungan satu sama lainnya sebagai pengalokasian sumber daya milik Negara kepada seluruh masyarakat dengan adil dan merata. Namun dalam implementasinya tujuan tersebut masih belum terealisasikan dengan baik. Hal inilah yang menjadi penyebab munculnya berbagai masalah termasuk krisis dalam ekonomi yang melanda Indonesia dan disebabkan karena timbulnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara melakukan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), monopoli dalam kegiatan hukum, monopoli dalam kegiatan perekonomian serta pelayanan terhadap publik yang kualitasnya memburuk.

Fakta yang terlihat sebagai bukti lemahnya penerapan *good governance* adalah terjadinya kasus korupsi yang terbilang tinggi. Masalah-masalah inilah yang menyebabkan terhambatnya proses perekonomian yang baik di Indonesia dan juga semakin banyaknya penduduk miskin di Indonesia. Menurut (Mardiasmo 2007) *governance* dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan dalam mengelola urusan-urusan publik. Secara teori *good governance* dikatakan menekankan pada proses pengelolaan pemerintahan dengan adanya *stakeholders* yang terlibat dalam bidang social, ekonomi dan juga politik serta ikut juga terlibat dalam pendayaan sumber daya yang ada, manusia atau pun keuangan yang dilaksanakan menurut keperluan masing-masing.

Pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan keuangan rakyat yang dipegang pemerintah dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggung jawaban sehingga akan tercipta akuntabilitas didalam pengelolaannya. Menurut (Suprayoga 2010) pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan salah satu prinsip dari *good governance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Halim (2012) akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai berikut: "Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan".

Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian lingkungan didefinisikan sebagai faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi dan berpotensi mengganggu kinerja organisasi bila organisasi tidak mampu beradaptasi dengan baik terhadap laju perubahan maupun dinamikanya, yang terdiri dari faktor tingkat perubahan regulasi, tingkat perubahan teknologi informasi, tingkat perubahan pasar dan persaingan (Tjahjadi, 2011).

Pengawasan Sistem Pengendalian Internal

Menurut PP No. 60 tahun 2008 salah satu komponen dalam lingkungan pengendalian internal yang wajib di ciptakan dan di pelihara sehingga menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal adalah melalui perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif tersebut diantaranya sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Kualitas Laporan Keuangan

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Laporan Keuangan adalah: "Laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya". (IAI, 2002 : par 47)

Kejelasan Sasaran Anggaran

Peraturan menteri dalam negeri (pemandagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Secara terperinci (Halim, 2012) memaparkan bahwa akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran pencacatan dan pemaparan transaksi ekonomi (keuangan) dan entitas pemerintahan daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang di perlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintahan daerah.

Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Hariadi et al (2010) menjelaskan bahwa pelaporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Suatu entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja.

2.METODE

Objek penelitian ini adalah pada kantor Walikot Jakarta Barat, Selatan dan Jakarta Pusat. Instansi pemerintahan tersebut diteliti mulai dari sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, kinerja dan kejelasan sasaran anggaran.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kausal. Menurut (Sugiyono 2009) Penelitian kausal bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variable (variable independen) terhadap variable lainnya (variable dependan). Dimana variable independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (X1), Ketidak Pastian Lingkungan (X2), Pengawasan Sistem Pengendalian Internal (X3), Kualitas Laporan Keuangan (X4), Kejelasan Sasaran Anggaran (X5) dan sebagai variabel dependen adalah penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y)

Metode Analisis Data

Sebelum dilakukan pengujian, data jawaban responden yang telah dikumpulkan perlu ditransformasi terlebih dahulu dari data ordinal menjadi data interval. Perubahan ini diperlukan karena pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda yang merupakan analisis statistik parameter dimana data minimal mempunyai skala interval.

Transformasi data ordinal data interval dalam penelitian ini dilakukan menggunakan compute variable dengan bantuan SPSS for windows 21.0. (Rahmin, 2014) menyatakan formula yang digunakan untuk mentransformasi data ordinal menjadi data interval adalah:

$$I = 50 + 10 \frac{(P - \pi)}{\sigma}$$

I	(Transformasi data interval)
P	(Variabel data ordinal yang ditrasnformasikan)
π	(Rata-rata hitung mean)
$\hat{\sigma}$	(Stadar deviasi)

Data yang telah ditransformasi menjadi data interval digunakan untuk menyusun model regresi linear berganda. Persamaan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Di mana :

Y	= penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah
α	= Nilai intersep (konstan)
$\beta_1.. \beta_5$	= Koefisien arah regresi
X1	= Akuntansi keuangan sektor publik
X2	= Ketidak pastian lingkungan
X3	= Pengawasan sistem pengendalian internal
X4	= Kualitas laporan keuangan
X5	= Kejelasan sasaran anggaran
e	= error

3. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Peneliti mengambil sampel di tiga kantor Walikota Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat). Kuesioner yang disebar berjumlah 150 buah dan jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 150 buah juga atau sekitar 100%. Gambar mengenai data sampel disajikan pada table 4.1 di bawan ini

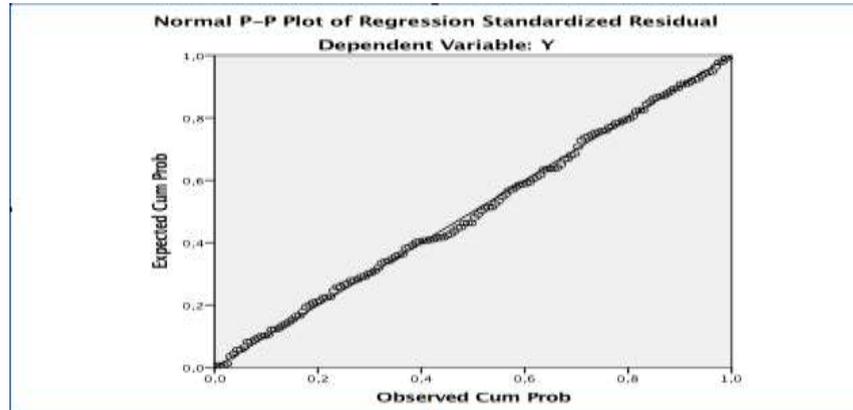
Tabel 4.1
Sampel dan Tingkat Pengembalian

Data penyebaran kuesioner	Jumlah data	Jumlah dalam %
1. Jumlah kuesioner yang disebar	150	100%
2. Jumlah kuesioner yang kembali	150	100%
3. Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0	0%
4. Total data yang dapat di olah	$150 \div 150 \times 100\%$	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil Statistik Deskriptif

Uji Normalitas



Gambar 1

Hasil Uji Normalitas dengan Metode Grafik
Sumber: Data olahan, 2017

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PASP	0,611	1,635
	KPL	0,871	1,148
	PSPI	0,984	1,016
	KLK	0,911	1,098
	KSA	0,568	1,076

Sumber: Data Olahan 2017

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas diketahui nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 dan *tolerance* > 0,10. Maka dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

Heteroskedastisitas

Tabel 4.11
Hasil uji heteroskedastisitas

variabel	variabel	sig	kesimpulan
X1	PASP	0,001	Tidak terjadi heteroskedastisitas

X2	KPL	0,885	Terjadi heteroskedastisitas
X3	PSPI	0,004	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X4	KLK	0,000	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X4	KAS	0,005	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Dari hasil tabel 4.11 diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa dari lima variabel 4 dari variabel tidak terjadi heteroskedastisitas di antaranya X1,X3,X4 dan X5 dan satu variabel terjadi heteroskedastisitas ya itu X2 dari pernyataan diatas.

Uji Analisis Data
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.14
Hasil Uji Statisitk F variabel Y, X1, X2, X3, X4, X5

ANOVAa

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	302,829	5	60,566	9,577	,000b
	Residual	910,671	144	6,324		
	Total	1213,5	149			

a Dependent Variable: Y

b Predictors: (Constant), X5, X3, X4, X2, X1

Sumber: Data Output SPSS 24

Dalam uji ANOVA atau F test menunjukkan, variabel independen bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen jika nilai probabilitas ($\hat{\rho}$) (pada kolom Sig) lebih kecil dari level signifikan yang ditentukan yaitu 0,05. Dari hasil output SPSS diatas, nilai probabilitas $0,000 \leq 0,05$ maka memiliki arti bawah ada pengaruh yang signifikan, jadi penerapan akuntansi sektor publik, ketidakpastian lingkungan, pengawasan sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah.

Hasil Uji Statistik t (Uji t)

Tabel 4.16
Hasil Uji Statisitk t Variabel Y, X1, X2, X3, X4, X5

Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,071	3,655		1,661	0,099
	X1	0,227	0,073	0,453	4,910	0,001
	X2	0,158	0,043	-0,011	-0,145	0,885
	X3	-0,006	0,057	0,216	2,789	0,004
	X4	0,031	0,094	-0,368	3,916	0,000
	X5	0,367	0,086	-0,089	-0,934	0,005

Sumber: Data Output SPSS 24

Dari tabel 4.19 diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Variabel penerapan akuntansi sektor publik memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ atau t hitung $4,910 > 1,668$ dapat di Tarik kesimpulan bahwa H_{a1} diterima, yang artinya penerapan akuntansi sektor publik diterima secara signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan.
- 2) Variabel ketidakpastian lingkungan memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $0,885 > 0,05$ atau t hitung $-0,145 < -1,668$ dapat di tarik kesimpulan bahwa H_{a2} tidak diterima, yang artinya ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan.
- 3) Variabel pengawasan sistem pengendalian internal memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $0,004 < 0,05$ atau t hitung $2,789 > 1,668$ dapat di tarik kesimpulan bahwa H_{a3} diterima, yang artinya pengawasan sistem pengendalian internal diterima secara signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan.
- 4) Variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ atau t hitung $3,916 > 1,668$ dapat di tarik kesimpulan bahwa H_{a4} diterima, yang artinya pengawasan kualitas laporan keuangan diterima secara signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan.
- 5) Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $0,005 < 0,05$ atau t hitung $-0,934 > 1,668$ dapat di tarik kesimpulan bahwa H_{a5} diterima, yang artinya kejelasan sasaran anggaran diterima secara signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan.

DISKUSI

Penerapan akuntansi sektor publik terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintahan Berdasarkan hasil output SPSS yang telah diuraikan diatas dapat dijelaskan bahwa pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintahan berpengaruh secara positif. hal ini menunjukkan semakin baik standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan maka akan menghasilkan pelaporan keuangan yang relevan di badan pemerintahan daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Aditya Senjaya (2017) tentang penerapan akuntansi pemerintahan daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah (penerapan akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintahan. Ketidakpastian lingkungan kerja terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan

Berdasarkan hasil output SPSS yang telah diuraikan diatas dapat dijelaskan bahwa Ketidakpastian lingkungan kerja terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan tidak berpengaruh positif. Hal ini menunjukan bahwa Ketidakpastian lingkungan kerja terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan tidak ada kaitannya dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintah daerah maupun pusat

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rahmad Bintang (2016) bahwa ketidakpastian lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan. Hal yang sama di ajukan oleh Rian Noprizal (2017) menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan kerja tidak berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan.

Pengawasan sistem pengendalian internal terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintahan Berdasarkan hasil output SPSS diatas dapat diuraikan bahwa pengawasan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintahan, hal ini dapat dijelaskan bawah pengawasan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintahan baik karyawan pemerintahan maupun badan pemerintahan sendiri. Hasil penelitian ini sesuai dengan Ni Made Asih Ristansi, Ni Kadek Sinarwati dan Edy Sujana (2014) sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintahan daerah.

Kualitas laporan keuangan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan Berdasarkan output SPSS yang telah di paparkan diatas dapat diuraikan bawah kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, ini dapat dijelaskan bahwa Kualitas laporan keuangan ada kaitan dengan transparansi pelaporan keuangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di pemerintahan daerah maupun pusat setiap pekerjaan pencatatan dan pengolahan data keuangan harus sesuai dengan ketentuan, laporan keuangan yang disajikan dan di laporkan tanpa adanya unsur kebohongan didalamnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nugraeni dan Budiantara (2015) bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan daerah. Kejelasan sasaran anggaran terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan

Berdasarkan hasil output SPSS yang telah diperlihatkan diatas dapat diuraikan bawah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan, dapat diartikan bahwa kejelasan sasaran anggaran pemerintah berkaitan erat terhadap transparansi pelaporan keuangan hal ini bertujuan agar anggaran yang dialokasikan pemerintahan pusat untuk daerah harus sesuai dengan kegunaannya dan transparan dalam memberikan pertanggung jawab kepada pemerintahan pusat maupun kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Satyaningsih, Atmaja, dan Dhamawa (2014) menyatakan bahwa Kejelasan

sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan.

4.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data serta interpretasinya, maka pada penelitian ini ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

- 1) Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan akuntansi sektor publik, maka akan semakin meningkatnya pengetahuan penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan. Pegawai pemerintahan yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi akan memberikan dampak terhadap lingkungan tempat pekerjaannya tersebut.
- 2) Ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil menunjukkan bahwa semakin rendahnya ketidakpastian lingkungan, maka tidak berpengaruhnya penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan, hal ini mengakibatkan adanya gesekan terhadap lingkungan sekitar tempat bekerja pegawai pemerintahan namun tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan yang di sajikan.
- 3) Pengawasan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengawasan sistem pengendalian internal, maka akan semakin meningkatnya pengetahuan penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan. Dalam hal ini pegawai pemerintahan diawasi oleh badan pemerintahan yang mengatur tata kelola pegawai pemerintahan baik sikap maupun dalam melaporkan pertanggungjawaban kepada pemerintahan pusat.
- 4) Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas laporan keuangan, maka akan semakin meningkatnya pengetahuan penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan. Suptansi pemerintahan yang mengelola bagian keuangan daerah sangat berperan penting dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) untuk di pertanggung jawabkan ke badan pemerintahan.
- 5) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran, maka akan semakin meningkatnya pengetahuan penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintahan. Baik pemerintahan daerah maupun masyarakat harus mengetahui anggaran yang diberikan pemerintahan pusat untuk daerah telah digunakan sesuai dengan yang telah dilaporakna ke pemerintahan pusat dan sebagai mestinya dipergunakan.

Implikasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada kantor pemerintahan khususnya walikota DKI.Jakarta untuk lebih memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat .

- 1) Penerapan akuntansi keuangan sektor publik dapat di pengaruhi dari perilaku-prilaku yang dimiliki oleh pegawai pemerintahan.
- 2) Ketidakpastian lingkungan dapat di pengaruhi dari lingkungan kantor pegawai di mana dia bekerja
- 3) Pengawasan sistem pengendalian internal hal ini dapat di pengaruhi oleh pejabat yang mempunyai wewenang di walikota dalam mengawasi pegawai pemerintahan dalam mengendalikan pemerintahaan daerah ataupun pusat
- 4) Kualitas laporan keuangan dapat di pengaruhi oleh bagaian pegawai keuangan di instansi pemerintahan
- 5) Kejelasan sasaran anggaran di pengaruhi oleh pemerintahan pusat dan daerah untuk pembangunan yang merata
- 6) Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bawah penerapan akuntansi keuangan sektor publik, Ketidak pastian lingkungan, Pengawasan sistem pengendalian internal, Kualitas laporan keuangan, Kejelasan sasaran anggaran masih ada terdapat variabel-variabel di luar dari variabel di atas yang tergali dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti mengharapkan partisipasinya aktif peneliti selanjutnya untuk meneliti vaiabel-variabel lain yang berpengaruh kinerja instansi pemerintahan, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih bervariasi dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Keterbatasan

Peneelitian ini memiliki keterbatasan yang mungkin dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian. Penelitian ini hanya menerapkan metode penyebaran kuesioner dan tidak menerapkan metode lainnya seperti wawancara dan metode lainnya.

Dalam penelitian ini hanya dilakukan penyebaran kuesioner pada Walikota Jakarta Pusat, Selatan dan Jakarta Barat sehingga penelitian ini hanya mencerminkan mengenai kondisi pegawai pemerintahan di Walikota Jakarta Pusat, Selatan dan Jakarta Barat.

Saran

- 1) Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lainnya yang memiliki kemungkinan adanya pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintahan selain variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini agar dapat memperoleh hasil yang maksimal.
- 2) Memperbanyak jumlah responden dan kantor walikota yang diteliti karena jumlah responden dan kantor walikota yang semakin banyak akan mempengaruhi hasil penelitian yang diperoleh menjadi akurat

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2012). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Abdul Halim dan Muhamad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Jakarta : Salemba Empat
- Abdul Halim dan Muhamad Syam Kusufi. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat
- Aryani, F. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga Satuan Kerja Mitra KPPN Medan II*. Tesis, Univeritas Sumatera, Medan
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- Bangun, A. (2009), *Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintahan kabupaten Deli Serdang)*. Tesis, Sekolah Pasca Sarjan Universitas Sumatera Utara, Medan
- Choirunisah, F. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang Tahun 2008)*
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal Control – Integrated Framework*
- Creswell, J.W dan Clark, V. L. (2011). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. 2nd ed. California: Sage Piblication, Inc.
- Dita Arfianti. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Firmansyah, I. (2010). Akuntansi Pemerintahan. Retrieved 02 9, 2016, from Membangun Transparansi Keuangan Daerah: <http://akuntansipemerintahan.wordpress.com/2010/11/10/membangun-transparansi-keuangan-daerah/>
- Ghozali, Imam (2016). Desain penelitian kuantitatif dan kualitatif , Yogi pratama ISBN : 978-602-0856-12-0
- Gudono. (2014). *Teori Organisasi*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Halim, A. dan Bawono, I.R. (2011). *Pengelolaan Keuangan Negara Daerah: Hukum Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksaan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM.
- Hasyadi, Kholiq. (2014). *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidak Pastian Lingkungan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan E-Procurement*. Tesis, Program Magister Akuntansi Univeritas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Herdoanto, W. (2014). *Pengaruh Faktor Teknik dan Organisasional terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia)*. Tesis. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Hevesi, G.A. (2005). Standards for Internal Control in New York State Government. www.osc.state.ny.us
- Kemah, Ihwan. (2013). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada pemerintahan kota manado. Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174 vol.1 No.3 September, hal 771-778
- Mardiasmo (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi Yogyakarta
- Mahsun, M. (2011). Konsep Dasar Pengukuran Kinerja. (Online). Tersedia: <http://mohamahsun.blogspot.com/2011/04/Konsep-dasar-pengukurankinerja.html> (10 Maret 2016)
- Mondher ,Kouki. (2016) *Corporate Governance Score and the Quality of Financial Disclosures: Evidence from the French Context* , ISSN 2162-3082 Vol. 6, No. 2
- M. Nafarin, (2007), *Penganggaran Perusahaan*, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat
- Nkwagu, Louis Chinedu, Okoye, Greg. Onuora, & Nkwagu, Christian Chibuike
- Ni Made Asih, Ni Kadek Sinarwati dan Edy Sujana. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalin Internal, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap penerapan good governance*. E-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesaha vol.2 No.1 tahun 2014
- Purwanti Nugraheni, dan Imam Subaweh. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Lpaoran Keuanga. Jurnal Ekonomi Bisnis, No. 1 Vol. 13 april 2008
- Parmono, Joko. (2014). Analisa Rasio Keuangan Untuk Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah. Among Makarti, Vol.7 No.13, juli 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Permadi, A. D. (2013). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bandung: Universitas Widyatama.
- Ramdany, Winwin Yadiati, Harry Suharman, Poppy Sofia K. (2017) *Effectiveness of internal control, good governance, and accounting information quality on budgetary discipline*. International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 12, Issue 1 (April) ISSN 2289-1552
- Rahmi, Willy, Abdullah, (2013), *Pengaruh Partisipasi dalam Anggaran dan Kejelasan Sasaran anggaran serta peran Manajerial Pengelolaan Keuangan terhadap kinerja Pemerintahan Daerah (Studi Emprisi pada pemerintahan Provinsi Bengkulu)*, Jurnal Fairness Vol.3. Hal. 42-53
- Reeve, J. M., warren, C. S., & Duchac, J. E. (2013). Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Robert O. Opanyi, (2016). *The Effect of Adoption of International Public Sector Accounting Standards on Quality of Financial Reports in Public Sector in Kenya*. European Scientific Journal edition vol.12, No.28 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431
- Sardjito B, Muthaher O. (2007), *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintahan Daerah, Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*, SNA X, Makassar